



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

A

**RENCANA PEMBELAJARAN A
TAHUN AKADEMIK QAAQAAAAQAQAQA2024/2025
SEMESTER GASAL**

A

S

QAACCCCCQA

NAMA DOSEN:

PROF. MUKHIBAT, M.AG

DR. SUGIYAR, M.PD



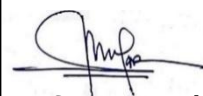

DR. MUHAMMAD GHAFAR, M.PD.I



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Studi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia	PAI529	MK Prodi	T=2	P=0	5	14 Agustus 2024
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Jurusan	
 Dr. Moh. Muntir, Lc., M.Ag	 Dr. Muhamad Ghafar, M.Pd.I		 Dr. Sugiyar, M.Pd.I		 Dr. Khatrisul Wathoni, M.Pd.I	
Capaian pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-1 (S9)	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri				
	CPL-2 (P5)	Memiliki pemahaman yang memadai tentang ilmu kurikulum PAI				
	CPL-3 (KU2)	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur				
	CPL-4 (KK3)	Mampu menganalisis kurikulum PAI sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS				
	Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CPL-1)				
	CPMK2	Memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia (CPL-2)				
	CPMK3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CPL-3)				
	CPMK4	Mampu menganalisis berbagai kebijakan pendidikan Islam yang berhubungan dengan kurikulum PAI (CPL-4)				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan prinsip dasar kebijakan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia (CPMK2)				

	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. (CPMK2, CPMK4)									
	Sub-CPMK3	Mampu mengidentifikasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. (CPMK2)									
	Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan kebijakan desentralisasi pendidikan sebagai peluang dan tantangan pendidikan Islam (CPMK2)									
	Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan kebijakan penguatan SDM guru; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, dan PP No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP 74 tahun 2008 Tentang Guru; pengertian guru, kualifikasi guru, kompetensi guru, hak dan kewajiban guru. (CPMK2)									
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan peran pesantren dalam pendidikan nasional; kajian atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. (CPMK2)									
	Sub-CPMK7	Mampu menjelaskan peran madrasah dalam pembangunan nasional; kajian atas UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. (CPMK2, CPMK3)									
	Sub-CPMK8	Mampu menganalisis kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah; kajian atas KMA No. 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah. (CPMK2, CPMK4)									
	Sub-CPMK9	Mampu menganalisis kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah; kajian atas KMA No. 347 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/KR/2022, Keputusan Kepala BSKAP Nomor 033/H/KR/2022, Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/KR/2022, dan Keputusan Kepala BSKAP Nomor 044/H/KR/2022. (CPMK2, CPMK3, CPMK4)									
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK										
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	
	CPMK1	√	√					√			
	CPMK2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	CPMK3						√	√		√	
	CPMK4				√				√	√	
Deskripsi singkat MK	Mata kuliah "Studi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia" bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan praktik kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Mahasiswa akan mempelajari dinamika kebijakan pendidikan Islam mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan dalam konteks sejarah, sosial, politik, dan budaya Indonesia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan menganalisis tentang berbagai isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan Islam, termasuk peran pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Topik yang dibahas mencakup integrasi kurikulum agama dan umum, Definisi, ruang lingkup, dan prinsip dasar kebijakan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia, Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, Kebijakan desentralisasi pendidikan sebagai peluang pendidikan Islam, Kebijakan penguatan SDM guru; UU										

	Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peran pesantren dalam system pendidikan nasional, Peran madrasah dalam pembangunan nasional, Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah, dan Kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah
Bahan kajian: Materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi, ruang lingkup, dan prinsip dasar kebijakan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia 2. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional 3. Kebijakan desentralisasi pendidikan sebagai peluang pendidikan Islam 4. Kebijakan penguatan SDM guru; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 5. Peran pesantren dalam system pendidikan nasional 6. Peran madrasah dalam pembangunan nasional 7. Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah 8. Kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://dinastirev.org/jihhp/article/view/854 2. https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/tasyri/article/view/1552 3. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5149 4. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3905 5. https://jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/44 6. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/93 7. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/134 8. https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/elwahdah/article/view/4630 9. KMA Nomor 117 Tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 13 di madrasah 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 13. PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru 14. KMA No. 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah , Keputusan Kepala BSKAP No. 008/H/KR/2022 , Keputusan kepala BSKAP No. 033/H/KR/2022 , Keputusan kepala BSKAP No. 009/H/KR/2022 , Keputusan Kepala BSKAP Nomor 044/H/KR/2022 , 15. Buku moderasi beragama, buku saku moderasi beragama 16. Mukhibat, M., Effendi, M., Setyawan, W. H., & Sutoyo, M. (2024). Development and evaluation of religious moderation education curriculum at higher education in Indonesia. <i>Cogent Education</i>, 11(1), 2302308. 17. Muhammad, G., & Anis Hidayatul, I. (2023). MODEL KEPEMIMPINAN INKLUSIF BERBASIS GENDER: Profil Sukses Kepemimpinan Wanita Di Perguruan Tinggi Islam Indonesia.

Dosen Pengampu		Dr. Muhamad Ghafar, M.Pd.I							
Mata kuliah syarat		-							
Pert. Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Bejalar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)			Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pengantar perkuliahan; Peta konsep mata kuliah, kontrak perkuliahan, teknis tugas.	1. Ketepatan dalam memahami peta konsep mata kuliah 2. Ketepatan dalam memahami kontrak perkuliahan 3. Ketepatan dalam memahami tekni tugas.	-	Kontrak Kuliah <ul style="list-style-type: none"> Dosen menyampaikan kepada mahasiswa secara offline tentang teknis perkuliahan dilaksanakan secara offline atau luring Dosen menyampaikan kepada mahasiswa secara offline tentang teknis tugas dan pengumpulannya. Dosen menyampaikan kepada mahasiswa secara offline tentang pelaksanaan UTS dan UAS Dosen menyampaikan kepada mahasiswa secara offline kedudukan studi kebijakan pendidikan Islam pada jurusan PAI. 		-	-	√	
2	Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan prinsip dasar kebijakan	1. Ketepatan dalam menjelaskan definisi kebijakan pendidikan	Kriteria: Pedoman penskoran Teknik: Non tes	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Metode Pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Diskusi Penugasan Mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> Artikel; 	-	(1, 2)	5%	√	

	pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia	<p>2. Ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam</p> <p>3. Ketepatan dalam menjelaskan prinsip dasar kebijakan pendidikan Islam</p>		<p>Judul</p> <p>Penulis</p> <p>Abstrak</p> <p>A. Pendahuluan</p> <p>B. Definisi kebijakan pendidikan</p> <p>C. Ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam</p> <p>D. Prinsip dasar kebijakan pendidikan Islam</p> <p>E. Kesimpulan</p> <p>Daftar pustaka</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPT 					
3	<p>Sub-CPMK2:</p> <p>Mampu menjelaskan perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia; Hakikat Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam, Komponen Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam, Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam dan Aktor Formulasi Kebijakan pendidikan Islam</p>	<p>1. Ketepatan dalam menjelaskan Hakikat Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam</p> <p>2. Ketepatan dalam menjelaskan Komponen Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam</p> <p>3. Ketepatan dalam memahami Formulasi Kebijakan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>Pedoman penskoran</p> <p>Teknik:</p> <p>Non tes</p>	<p>Bentuk Pembelajaran:</p> <p>Kuliah</p> <p>Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi <p>Penugasan Mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel; <p>Judul</p> <p>Penulis</p> <p>Abstrak</p> <p>A. Pendahuluan</p> <p>B. Hakikat Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam</p> <p>C. Komponen Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam</p> <p>D. Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam</p> <p>E. Aktor Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam</p>	-	(3)	5%	√	

		Pendidikan Islam 4. Ketepatan dalam menjelaskan Aktor Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam		F. Kesimpulan Daftar pustaka • PPT					
4	Sub-CPMK3: Mampu mengidentifikasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional; Definisi pendidikan Islam dalam konteks UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Landasan yuridis pendidikan Islam di Indonesia, Kedudukan pendidikan Islam dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas	1. Ketepatan dalam menjelaskan Definisi pendidikan Islam dalam konteks UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 2. Ketepatan dalam menjelaskan Landasan yuridis pendidikan Islam di Indonesia 3. Ketepatan dalam menjelaskan Kedudukan pendidikan Islam dalam UU No 20 tahun 2003	Kriteria: Pedoman penskoran Teknik: Non tes	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Metode Pembelajaran: • Presentasi • Diskusi Penugasan Mahasiswa: • Artikel; Judul Penulis Abstrak A. Pendahuluan B. Definisi pendidikan Islam dalam konteks UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas C. Landasan yuridis pendidikan Islam di Indonesia D. Kedudukan pendidikan Islam dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas E. Kesimpulan Daftar pustaka • PPT	-	(1, 4)	5%	√	

		tentang Sisdiknas							
5	Sub-CPMK4: Mampu menjelaskan kebijakan desentralisasi pendidikan sebagai peluang dan tantangan pendidikan Islam; kajian atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, peluang dan tantangan pendidikan Islam terhadap kebijakan desentralisasi pendidikan	1. Ketepatan dalam memahami pengertian otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. 2. Ketepatan dalam mengidentifikasi peluang pendidikan Islam terhadap kebijaksanaan desentralisasi pendidikan 3. Ketepatan dalam mengidentifikasi tantangan pendidikan Islam terhadap kebijakan desentralisasi pendidikan.	Kriteria: Pedoman penskoran Teknik: Non tes	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Metode Pembelajaran: • Presentasi • Diskusi Penugasan Mahasiswa: • Artikel; Judul Penulis Abstrak A. Pendahuluan B. Pengertian otonomi daerah dan Desentralisasi Pendidikan C. Peluang pendidikan Islam terhadap kebijaksanaan desentralisasi pendidikan D. Tantangan pendidikan Islam terhadap kebijakan desentralisasi pendidikan E. Kesimpulan Daftar pustaka • PPT	-	(5)	5%	√	
6	Sub-CPMK5: Mampu menjelaskan kebijakan penguatan SDM guru; UU Nomor 14 Tahun 2005	1. Ketepatan menjelaskan definisi guru berdasar regulasi yang berlaku	Kriteria: Pedoman penskoran Teknik: Non tes	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Metode Pembelajaran: • Presentasi • Diskusi Penugasan Mahasiswa: • Artikel;	-	(13, 14)	5%	√	

	tentang Guru dan Dosen, PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, dan PP No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP 74 tahun 2008 Tentang Guru; pengertian guru, kualifikasi guru, kompetensi guru, hak dan kewajiban guru	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketepatan menjelaskan kualifikasi guru 3. Ketepatan menjelaskan kompetensi guru 4. Ketepatan mengidentifikasi hak dan kewajiban guru 		<p>Judul Penulis Abstrak</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Pendahuluan B. Pengertian guru dalam UU Nomor 14 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, dan PP No. 19 Tahun 2017. C. Kualifikasi guru D. Kompetensi guru E. Hak dan kewajiban guru F. Kesimpulan <p>Daftar pustaka</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PPT 					
7	Sub-CPMK6: Mampu menjelaskan peran pesantren dalam pendidikan nasional; kajian atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kronologis lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, legalitas pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan memahami kronologis lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren 2. Ketepatan menjelaskan legalitas pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan 3. Ketepatan menganalisis UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren sebagai 	<p>Kriteria: Pedoman penskoran</p> <p>Teknik: Non tes</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Kuliah</p> <p>Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Presentasi ● Diskusi <p>Penugasan Mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Artikel; <p>Judul Penulis Abstrak</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Pendahuluan B. Kronologis lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren C. Legalitas pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan D. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren; peluang atau kekangan? E. Kesimpulan 	-	(11)	5%	√	

	pesantren; peluang atau kekangan?	sebuah peluang atau kekangan.		Daftar pustaka • PPT						
8	Ujian Tengah Semester (UTS)									
9	Sub-CPMK7: Mampu menjelaskan peran madrasah dalam pembangunan nasional; kajian atas UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; madrasah dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, penyelenggaraan pendidikan di madrasah berdasar PMA Nomor 90 Tahun 2013, peluang dan tantangan madrasah di era teknologi digital.	1. Ketepatan memahami kedudukan madrasah dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 2. Ketepatan menjelaskan penyelenggaraan pendidikan di madrasah berdasar PMA Nomor 90 Tahun 2013 3. Ketepatan mengidentifikasi peluang dan tantangan madrasah di era teknologi digital.	Kriteria: Pedoman penskoran Teknik: Non tes	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Metode Pembelajaran: • Presentasi • Diskusi Penugasan Mahasiswa: • Artikel; Judul Penulis Abstrak A. Pendahuluan B. Kedudukan madrasah dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas C. Penyelenggaraan pendidikan di madrasah berdasar PMA Nomor 90 Tahun 2013 D. Peluang dan tantangan madrasah di era teknologi digital. E. Kesimpulan Daftar pustaka • PPT	-	(3, 12)	5%	√		
10	Sub-CPMK8: Mampu menganalisis kebijakan	1. Ketepatan dalam menganalisis urgensi	Kriteria: Pedoman penskoran	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Metode Pembelajaran: • Presentasi	-	(9)	5%	√		

	Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah; kajian atas KMA No. 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah; Urgensi implementasi K-13 di madrasah, Sebaran mata Pelajaran K-13 pada madrasah tsanawiyah , Problematika implementasi kurikulum 2013 di madrasah tsanawiyah .	<p>implementasi K-13 di madrasah</p> <p>2. Ketepatan dalam mengidentifikasi sebaran mata Pelajaran pada madrasah tsanawiyah</p> <p>3. Kritik terhadap implementasi kurikulum 2013 di madrasah tsanawiyah.</p>	<p>Teknik: Non tes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi • Seminar nasional/studium general fakultas terkait materi <p>Penugasan Mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel; Judul Penulis Abstrak A. Pendahuluan B. urgensi implementasi K-13 di madrasah C. Sebaran mata Pelajaran pada madrasah tsanawiyah D. Kritik terhadap implementasi kurikulum 2013 di madrasah tsanawiyah. E. Kesimpulan Daftar pustaka • PPT 					
11	Sub-CPMK8: Mampu menganalisis kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah; kajian atas KMA No. 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah; Urgensi implementasi K-13 di	<p>1. Ketepatan dalam menganalisis urgensi implementasi K-13 di madrasah</p> <p>2. Ketepatan dalam mengidentifikasi sebaran mata Pelajaran pada madrasah aliyah</p>	<p>Kriteria: Pedoman penskoran</p> <p>Teknik: Non tes</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Kuliah</p> <p>Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi <p>Penugasan Mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel; Judul Penulis Abstrak A. Pendahuluan B. Urgensi implementasi K-13 di madrasah C. Sebaran mata Pelajaran pada madrasah aliyah 	-	(9)	5%	√	

	<p>madrasah, Sebaran mata Pelajaran K-13 pada madrasah aliyah, Problematika implementasi kurikulum 2013 di madrasah aliyah.</p>	<p>3. Kritik terhadap implementasi kurikulum 2013 di madrasah aliyah.</p>		<p>D. Kritik terhadap implementasi kurikulum 2013 di madrasah aliyah. E. Kesimpulan Daftar pustaka ● PPT</p>					
12	<p>Sub-CPMK9: Mampu menganalisis kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah; kajian atas KMA No. 347 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/KR/2022; Urgensi implementasi kurikulum Merdeka, Standar kompetensi kelulusan madrasah, Standar Isi Pendidikan agama Islam</p>	<p>1. Ketepatan menganalisis Urgensi implementasi kurikulum Merdeka 2. Ketepatan mengidentifikasi Standar kompetensi kelulusan (SKL) madrasah 3. Ketepatan mengidentifikasi Standar Isi (SI) Pendidikan agama Islam 4. Problem pencapaian SKL dan SI pada madrasah</p>	<p>Kriteria: Pedoman penskoran Teknik: Non tes</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Kuliah Metode Pembelajaran: ● Presentasi ● Diskusi Penugasan Mahasiswa: ● Artikel; Judul Penulis Abstrak A. Pendahuluan B. Urgensi implementasi kurikulum Merdeka C. Standar kompetensi kelulusan (SKL) madrasah D. Standar Isi (SI) Pendidikan agama Islam E. Problem pencapaian SKL dan SI pada madrasah F. Kesimpulan Daftar pustaka ● PPT</p>	-	(14)	5%	√	
13	<p>Sub-CPMK9: Mampu menjelaskan Profil pelajar</p>	<p>1. Ketepatan memahami Profil pelajar Pancasila</p>	<p>Kriteria: Pedoman penskoran</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Kuliah Metode Pembelajaran: ● Presentasi</p>	-	(14)	5%	√	

	Pancasila, Profil pelajar <i>Rahmatan lil 'Alamin</i> ,	2. Ketepatan memahami Profil pelajar <i>Rahmatan lil 'Alamin</i> 3. Ketepatan menganalisis Relevansi profil pelajar Pancasila dan Profil pelajar <i>Rahmatan lil 'Alamin</i> .	Teknik: Non tes	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Penugasan Mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> • Artikel; Judul Penulis Abstrak A. Pendahuluan B. Profil pelajar Pancasila C. Profil pelajar <i>Rahmatan lil 'Alamin</i> D. Ketepatan menganalisis Relevansi profil pelajar Pancasila dan Profil pelajar <i>Rahmatan lil 'Alamin</i>. E. Kesimpulan Daftar pustaka • PPT 					
14	Sub-CPMK9: Mampu memahami isu dualisme ilmu pengetahuan; ilmu agama dan ilmu umum. Kajian kebijakan Pelajaran agama pada sekolah di bawah naungan Kemendikbudristek dan Pelajaran Umum di Madrasah.	1. Ketepatan memahami pentingnya integrasi keilmuan pada lembaga pendidikan 2. Ketepatan memahami regulasi Pelajaran agama di sekolah sekolah di bawah naungan Kemendikbudristek	Kriteria: Pedoman penskoran Teknik: Non tes; kuis	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Metode Pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Penugasan Mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> • Searching artikel terkait isu yang sedang dikaji dan dikumpulkan dalam bentuk PPT. • Bersifat mandiri 	-	(1, 2)	5%	√	

		<p>3. Ketepatan memahami regulasi Pelajaran umum di madrasah</p> <p>4. Ketepatan dalam memberikan Solusi keseimbangan antara Pelajaran agama dan umum di lembaga pendidikan.</p>							
15	<p>Sub-CPMK9: Mampu memahami Isu kebijakan pendidikan Islam terkait radikalisme dan moderasi</p>	<p>1. Ketepatan menjelaskan konsep moderasi dalam konteks ke-Indonesiaan</p> <p>2. Ketepatan memahami indicator moderasi beragama dalam konteks ke-Indonesiaan.</p>	<p>Kriteria: Pedoman penskoran</p> <p>Teknik: Non tes; kuis</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Kuliah</p> <p>Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi <p>Penugasan Mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Searching artikel terkait isu yang sedang dikaji dan dikumpulkan dalam bentuk PPT. • Bersifat mandiri 	-	(15, 16, 17)	5%	√	
16	Ujian Akhir Semester (UAS)								



**SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Mata Kuliah Studi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Bacalah setiap soal dengan cermat sebelum menjawab dan jawaban harus dijelaskan secara argumentatif dan terstruktur!

1. Jelaskan definisi kebijakan pendidikan Islam serta ruang lingkup dan prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mengintegrasikan kebijakan ini ke dalam sistem pendidikan di Indonesia.
2. Analisislah hubungan antara pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Bagaimana peran pendidikan Islam dalam mendukung visi pendidikan nasional?
3. Jabarkan bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan memberikan peluang bagi pengembangan pendidikan Islam di tingkat daerah. Berikan contoh implementasi kebijakan desentralisasi ini dalam mendukung pendidikan Islam.
4. Evaluasilah dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan Islam. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan desentralisasi mendukung pemerataan akses pendidikan Islam?
5. Jelaskanlah tujuan dan manfaat kebijakan penguatan SDM guru berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bagaimana kebijakan ini dapat berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan Islam?
6. Analisislah tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait penguatan SDM guru pendidikan Islam. Berikan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.



**SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Mata Kuliah Studi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Kerjakan soal-soal berikut dengan menjawab secara lengkap dan terstruktur. Jawaban diharapkan memiliki argumen yang kuat, contoh yang relevan, dan mencakup pemahaman yang mendalam tentang topik yang diberikan.

1. Jelaskan peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan karakter serta keterampilan hidup siswa di Indonesia.
2. Analisis peran madrasah dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kontribusinya terhadap masyarakat Indonesia yang lebih baik.
3. Diskusikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum 2013 di madrasah, serta bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.
4. Evaluasi kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah dan jelaskan dampaknya terhadap perubahan pola pengajaran dan pembelajaran dalam konteks pendidikan Islam.
5. Bandingkan implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di madrasah, serta analisis perbedaan mendasar antara kedua kurikulum tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh madrasah untuk memastikan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka, dan analisis peran guru serta kepala madrasah dalam mewujudkan kebijakan ini.